KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00420A | Tanggal 07-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Medan II (123)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 216.873.928,00

**** DUA RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.424007/2024 Tanggal :24-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/123.24001125/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000	244.396.000,00
Jumlah Pengeluaran	244.396.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410141.076.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0751.2.000000.000000	3.302.649,00
663509.123.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0701.2.000000.000000	24.219.423,00
Jumlah Potongan	27.522.072,00
TOTAL PEMBAYARAN	216.873.928,00

Kepada:

Nomor	: 1193750	Bank / Pos	: BPD ACEH SYARIAH
Nama Supplier	: CV. IRA UTAMA KARYA	Rekening	: 71001060011335
NPWP1	: 0015793987115000	Nama Pemilik	: CV IRA UTAMA KARYA
NPWP2	: 0001589001125000	Alamat	: Jl. KH Agus Salim Lk VIII Kel Desa Teladan Kisaran
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor:01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 22-10-2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No.02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 28-10-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23| NTAyODE3MDg=

Medan, 07 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUNAWIR
NIP 198310132009101002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00420A
Tanggal : 07-November-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000		
1	003.004.0C.006043-Hard Disk	1.891.000,00
2	003.004.0C.006044-Audio Mixer Saramonic	4.699.000,00
3	003.004.0C.006045-Kamera Sony	39.200.000,00
4	003.004.0C.006046-Headphone Wireless	15.799.000,00
5	003.004.0C.006047-Laptop Expertbook	59.337.000,00
6	003.004.0C.006048-Laptop	73.320.000,00
7	003.004.0C.006049-Microphone Wireless	8.110.000,00
8	003.004.0C.006050-PC	42.040.000,00
	Jumlah	**244.396.000,00**
Jumlah		**244.396.000,00**

Medan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUNAWIR
NIP 198310132009101002

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00420A | Tanggal 06-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Medan II (123)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 216.873.928,00

**** DUA RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.424007/2024 Tanggal :24-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/123.24001125/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000	244.396.000,00
Jumlah Pengeluaran	244.396.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410141.076.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0751.2.000000.000000	3.302.649,00
663509.123.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0701.2.000000.000000	24.219.423,00
Jumlah Potongan	27.522.072,00
TOTAL PEMBAYARAN	216.873.928,00

Kepada:

Nomor	: 1193750	Bank / Pos	: BPD ACEH SYARIAH
Nama Supplier	: CV. IRA UTAMA KARYA	Rekening	: 71001060011335
NPWP1	: 0015793987115000	Nama Pemilik	: CV IRA UTAMA KARYA
NPWP2	: 0001589001125000	Alamat	: Jl. KH Agus Salim Lk VIII Kel Desa Teladan Kisaran
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor:01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 22-10-2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No.02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 28-10-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Medan, 6 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUNAWIR
NIP 198310132009101002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00420A
Tanggal : 06-November-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000		
1	003.004.0C.006043-Hard Disk	1.891.000,00
2	003.004.0C.006044-Audio Mixer Saramonic	4.699.000,00
3	003.004.0C.006045-Kamera Sony	39.200.000,00
4	003.004.0C.006046-Headphone Wireless	15.799.000,00
5	003.004.0C.006047-Laptop Expertbook	59.337.000,00
6	003.004.0C.006048-Laptop	73.320.000,00
7	003.004.0C.006049-Microphone Wireless	8.110.000,00
8	003.004.0C.006050-PC	42.040.000,00
	Jumlah	**244.396.000,00**
Jumlah		**244.396.000,00**

Medan, 6 November 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUNAWIR
NIP 198310132009101002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00420T | Tanggal 06-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Medan II (123)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 216.873.928,00

**** DUA RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.424007/2024 Tanggal :24-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/123.24001125/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000	244.396.000,00
Jumlah Pengeluaran	244.396.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410141.076.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0751.2.000000.000000	3.302.649,00
663509.123.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0701.2.000000.000000	24.219.423,00
Jumlah Potongan	27.522.072,00
TOTAL PEMBAYARAN	216.873.928,00

Kepada:

Nomor	: 1193750	Bank / Pos	: BPD ACEH SYARIAH
Nama Supplier	: CV. IRA UTAMA KARYA	Rekening	: 71001060011335
NPWP1	: 0015793987115000	Nama Pemilik	: CV IRA UTAMA KARYA
NPWP2	: 0001589001125000	Alamat	: Jl. KH Agus Salim Lk VIII Kel Desa Teladan Kisaran
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor:01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 22-10-2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No.02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 28-10-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Medan, 6 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I
NIP 197503212003121002

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00420T

Tanggal : 06-November-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000		
1	003.004.0C.006043-Hard Disk	1.891.000,00
2	003.004.0C.006044-Audio Mixer Saramonic	4.699.000,00
3	003.004.0C.006045-Kamera Sony	39.200.000,00
4	003.004.0C.006046-Headphone Wireless	15.799.000,00
5	003.004.0C.006047-Laptop Expertbook	59.337.000,00
6	003.004.0C.006048-Laptop	73.320.000,00
7	003.004.0C.006049-Microphone Wireless	8.110.000,00
8	003.004.0C.006050-PC	42.040.000,00
	Jumlah	**244.396.000,00**
Jumlah		**244.396.000,00**

Medan, 6 November 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I
NIP 197503212003121002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00420T | Tanggal 06-Nov-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Medan II (123)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 216.873.928,00

**** DUA RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.04.2.424007/2024 Tanggal :24-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/123.24001125/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000	244.396.000,00
Jumlah Pengeluaran	244.396.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410141.076.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0751.2.000000.000000	3.302.649,00
663509.123.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0701.2.000000.000000	24.219.423,00
Jumlah Potongan	27.522.072,00
TOTAL PEMBAYARAN	216.873.928,00

Kepada:

Nomor	: 1193750	Bank / Pos	: BPD ACEH SYARIAH
Nama Supplier	: CV. IRA UTAMA KARYA	Rekening	: 71001060011335
NPWP1	: 0015793987115000	Nama Pemilik	: CV IRA UTAMA KARYA
NPWP2	: 0001589001125000	Alamat	: Jl. KH Agus Salim Lk VIII Kel Desa Teladan Kisaran
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor:01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 22-10-2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No.02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tgl 28-10-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
@23| NTAxNDY4OTM=

Medan, 06 November 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I
NIP 197503212003121002

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00420T

Tanggal : 06-November-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000		
1	003.004.0C.006043-Hard Disk	1.891.000,00
2	003.004.0C.006044-Audio Mixer Saramonic	4.699.000,00
3	003.004.0C.006045-Kamera Sony	39.200.000,00
4	003.004.0C.006046-Headphone Wireless	15.799.000,00
5	003.004.0C.006047-Laptop Expertbook	59.337.000,00
6	003.004.0C.006048-Laptop	73.320.000,00
7	003.004.0C.006049-Microphone Wireless	8.110.000,00
8	003.004.0C.006050-PC	42.040.000,00
	Jumlah	**244.396.000,00**
Jumlah		**244.396.000,00**

Medan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I

NIP 197503212003121002

Lampiran I
Format SPTB untuk SPM-LS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : In.07/B.3b/KU.00.1/ 00420 /2024

1. Nama Satuan Kerja : UIN Sumatera Utara Medan
2. Kode Satuan Kerja : 424007
3. Tanggal / No. DIPA : 28 Nopember 2023, Nomor: DIPA-025.04.2.424007/2024
4. Klasifikasi Anggaran : 10/90/07/2132/BEI/532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja UIN Sumatera Utara Medan menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

NO	AKUN	PENERIMA	U R A I A N	JUMLAH		Pajak yang dipungut	
						PPN	PPh
1	532111	CV. IRA UTAMA KARYA	Pembayaran lunas Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor : 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No. 02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024,	Rp	244.396.000	24.219.423	3.302.649
			J u m l a h	**Rp**	**244.396.000**	**24.219.423**	**3.302.649**

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 06 November 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I
NIP. 197503212003121002

Lampiran V
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 37/PB/2009
Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi
Belanja PNS Pusat kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga

KEMENTERIAN AGAMA REPBULIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444 Telepon (061) 6622925

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I
NIP.	: 1975032120031002
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sumatera Utara Medan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor : 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No. 02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 sebesar Rp.244.396.000, (Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada yang bersangkutan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran Pembayaran Belanja Modal Untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor : 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Dengan Nilai Kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No. 02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 tersebut, sebagian atau seluruhnya kami betanggungjawab dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Medan, 06 Nopember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I
NIP. 1975032120031002

Lampiran III : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 190/PMK.05/2012
Tentang : Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 2132.BEI.003.004.OC.532111

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Modal UIN Sumatera Utara Medan
Jumlah uang : Rp. 244.396.000,-
Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah;
Untuk pembayaran : Pengadaan Peralan Dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor: 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp.244.396.000,-, BAST No. 02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Medan, 29 Oktober 2024

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Barang dan Belanja Modal
UIN Sumatera Utara Medan

Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
NIP. 197503212003121002

Yang Menerima

CV. IRA UTAMA KARYA

Agus Lubis
Direktur

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 01 - 579 - 398 - 7 - 115 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV IRA UTAMA KARYA

ALAMAT WP : JL. KH. AGUS SALIM LK VIII, KAB. ASAHAN

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak: 411211

Kode Jenis Setoran: 910

Uraian Pembayaran : PPN

Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

2024

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 24.219.423 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas .....

Wajib Pajak / Penyetor
Medan, Tanggal
Cap dan tanda tangan

Arif Rahman, SE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **3**

Untuk Dilaporkan Oleh WP ke KPP

NPWP : 01 - 579 - 398 - 7 - 115 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV IRA UTAMA KARYA

ALAMAT WP : JL. KH. AGUS SALIM LK VIII, KAB. ASAHAN

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411211	910

Uraian Pembayaran : PPN

Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2024

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 24.219.423 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal	Medan, Tanggal
Cap dan tanda tangan	Cap dan tanda tangan
Nama Jelas	Arif Rahman, SE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01 - 579 - 398 - 7 - 115 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV IRA UTAMA KARYA

ALAMAT WP : JL. KH. AGUS SALIM LK VIII, KAB. ASAHAN

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411211	910

Uraian Pembayaran : PPN

Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2024

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 24.219.423 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal	Medan, Tanggal
Cap dan tanda tangan	Cap dan tanda tangan
Nama Jelas	Arif Rahman, SE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 01-579-398-7-115-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV IRA UTAMA KARYA
ALAMAT WP : JL. KH. AGUS SALIM LK VIII, KAB. ASAHAN

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411122	910

Uraian Pembayaran : PPh 22

Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

2024

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 3.302.649 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal	Medan, Tanggal
Cap dan tanda tangan	Cap dan tanda tangan
Nama Jelas	Arif Rahman, SE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **3**

Untuk Dilaporkan Oleh WP ke KPP

NPWP : 01-579-398-7-115-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV IRA UTAMA KARYA

ALAMAT WP : JL. KH. AGUS SALIM LK VIII, KAB. ASAHAN

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411122	910

Uraian Pembayaran : PPh 22

Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2024

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 3.302.649 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal	Medan, Tanggal
Cap dan tanda tangan	Cap dan tanda tangan
Nama Jelas	Arif Rahman, SE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01-579-398-7-115-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV IRA UTAMA KARYA

ALAMAT WP : JL. KH. AGUS SALIM LK VIII, KAB. ASAHAN

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP : .....

.....

Kode Akun Pajak: 411122

Kode Jenis Setoran: 910

Uraian Pembayaran : PPh 22

Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Sesuai Surat Pesanan Nomor 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

2024

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 3.302.649 *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas .....

Wajib Pajak / Penyetor
Medan, Tanggal
Cap dan tanda tangan

Arif Rahman, SE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

CV. IRA UTAMA KARYA

KONTRAKTOR- LEVERANSIR

JL. K. H. AGUS SALIM LK.VIII KEL./DESA TELADAN KEC. KOTA KISARAN TIMUR

Medan, 28 Oktober 2024

Nomor : 176/SPm/CV.IUK/X/2024
Lampiran : -
Perilah : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth:
Bagian Keuangan, Manager Administrasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pengadaan Unit dengan ID Paket LTN-P2410-10712862 telah selesai kami laksanakan

Berkenaan dengan hal tersebur diatas dengan ini kami mohon kiranya dapat dibayarkan sebesar **100%** **Rp 244.396.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)** dari total keseluruhan nilai kontrak (Include PPN 11%) pada rekening kami di **BANK ACEH SYARIAH Cabang S Parman Medan Di Nomor Rekening 710.01.06.001133-5 A/N CV. IRA UTAMA KARYA.**

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
CV. IRA UTAMA KARYA



Agus Lubis
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444
Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimile (061) 6615683
Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN

Nomor : 03/BAPP/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Modal UIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Kampus II UIN Sumatera Utara Medan Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Disebut *PIHAK PERTAMA*

Nama : **Agus Lubis**
Jabatan : Direktur, CV. IRA UTAMA KARYA
Alamat : Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur
NPWP : 01.579.398.7-115.000

Disebut *PIHAK KEDUA*

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAP/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 untuk Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS, maka kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 244.396.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Pembayaran tersebut agar ditransfer melalui **BANK ACEH SYARIAH Cabang S Parman Medan**, Nomor Rekening: **710.01.06.001133-5** An. CV. IRA UTAMA KARYA.

Demikian Berita Acara Persetujuan Pembayaran ini diperbuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
CV. IRA UTAMA KARYA

Agus Lubis
Direktur

PIHAK PERTAMA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Barang Dan Belanja Modal
UIN Sumatera Utara Medan

Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
NIP. 197503212003121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444
Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimile (061) 6615683
Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 02/BAST/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 628 Tahun 2024 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Agus Lubis : Direktur , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. IRA UTAMA KARYA, yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, dengan ini melakukan Serah Terima Barang dengan ketentuan PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA sesuai spesifikasi kendaraan, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS
Jumlah/Volume :

No.	Nama Barang	Vol/Sat
1.	Headphone Wireless	2 Unit
2.	Personal Computer (PC)	2 Unit
3.	Laptop - ExpertBook	3 Unit
4.	ACER Travelmate P214	4 Unit
5.	Microphone Wireless	2 Unit
6.	Audio Mixer	2 Unit
7.	Harddisk	1 Unit
8.	Kamera	2 Unit

Lokasi : Kampus IV UIN Sumatera Utara Medan, Tuntungan, Fakultas Ilmu Sosial
Lembaga : Kementerian Agama/UIN Sumatera Utara Medan
Sumber Dana : DIPA UIN Sumatera Utara Tahun 2024.

Demikian berita acara serah terima Barang ini dibuat dan ditanda tangani di Medan pada tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA Barang/Jasa
CV. IRA UTAMA KARYA

CV. IRA UTAMA KARYA ARAHAN KONTRAKTOR

Agus Lubis
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Barang dan Belanja Modal
UIN Sumatera Utara Medan

Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
NIP: 197503212003121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444
Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimile (061) 6615683
Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 01/BAP/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 628 Tahun 2024 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Agus Lubis : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. IRA UTAMA KARYA, yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS, dengan ini melakukan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Vol/Sat
1.	Headphone Wireless	2 Unit
2.	Personal Computer (PC)	2 Unit
3.	Laptop - ExpertBook	3 Unit
4.	ACER Travelmate P214	4 Unit
5.	Microphone Wireless	2 Unit
6.	Audio Mixer	2 Unit
7.	Harddisk	1 Unit
8.	Kamera	2 Unit

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani di Medan pada tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA Barang/Jasa
CV. IRA UTAMA KARYA

CV. IRA UTAMA KARYA SAHAN KONTRAKTOR

Agus Lubis
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Barang dan Belanja Modal
UIN Sumatera Utara Medan

Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I
NIP. 197503212003121002

CV. IRA UTAMA KARYA

KONTRAKTOR- LEVERANSIR

JL. K. H. AGUS SALIM LK.VIII KEL./DESA TELADAN KEC. KOTA KISARAN TIMUR

Medan, 28 Oktober 2024

Nomor : 084/BAStB/CV.IUK/X/2024
Lampiran : -
Hal : **Surat Serah Terima Barang**

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Tempat

Dengan Hormat,
Sesuai dengan Surat Pesanan **PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS** Nomor : 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang berlokasi **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan** dengan ini kami mengirim bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut, sebagai berikut:

No	Nama Produk	Merk	Tipe	Kuantitas
1.	Headphone Wireless	Edifier	STAX Spirit S3	2
2.	Personal Computer (PC)	ACER	Veriton Z4 AIO	2
3.	Laptop - ExpertBook	ASUS	Expertbook	3
4.	ACER Travelmate P214	ACER	Travelmate P214	4
5.	Microphone Wireless	Ashley	Ashley PRO 1	2
6.	Audio Mixer	Saramonic	Smartrig+	2
7.	Harddisk	WD	2 TB	1
8.	Kamera	SONY	A6400	2

Demikian disampaikan, agar dapat diterima dengan baik

Hormat Kami
CV. IRA UTAMA KARYA

CV. IRA UTAMA KARYA PERSEROAN KONTRAKTOR

AGUS LUBIS
DIREKTUR

Diterima Oleh
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

(Dr. H. RAPHIMUL HASANAH, M.Pd, MA)

CV. IRA UTAMA KARYA

KONTRAKTOR- LEVERANSIR

JL. K. H. AGUS SALIM LK.VIII KEL./DESA TELADAN KEC. KOTA KISARAN TIMUR

Medan, 28 Oktober 2024

Nomor : 084/BAStB/CV.IUK/X/2024
Lampiran : -
Hal : **Surat Serah Terima Barang**

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Tempat

Dengan Hormat,
Sesuai dengan Surat Pesanan **PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS** Nomor : 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang berlokasi **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan** dengan ini kami mengirim bahan-bahan untuk pekerjaan tersebut, sebagai berikut:

No	Nama Produk	Kuantitas
1.	Headphone Wireless	2
2.	Personal Computer (PC)	2
3.	Laptop - ExpertBook	3
4.	ACER Travelmate P214	4
5.	Microphone Wireless	2
6.	Audio Mixer	2
7.	Harddisk	1
8.	Kamera	2

Demikian disampaikan, agar dapat diterima dengan baik

Hormat Kami
CV. IRA UTAMA KARYA

CV. IRA UTAMA KARYA ASAHAN KONTRAKTOR

AGUS LUBIS
DIREKTUR

Diterima Oleh
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. H. Rahmad Hasanah, M.Pd, M.A

SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK

Nomor: 02/PPK-UIN SU/EP/FIS-PM/X/2024

Tanggal : 22 OKTOBER 2024

PEKERJAAN

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN TAHUN 2024

SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK
Nomor : 02/PPK-UIN SU/EP/FIS-PM/X/2024

Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Pekerjaan	:	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS
Anggaran	:	DIPA UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-10-2024) antara **Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Modal yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : 155 Tahun 2024, selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Barang dan Belanja Modal** dan **Agus Lubis**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. IRA UTAMA KARYA yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur, selanjutnya disebut **Penyedia.**

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PPK** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan adalah sebesar **Rp. 244.396.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah),** dengan daftar Produk Paket **LTN-P2410-10712862** sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan
1.	Headphone Wireless	2	Rp 7.899.500,-
2.	Personal Computer (PC)	2	Rp 21.020.000,-
3.	Laptop - ExpertBook	3	Rp 19.779.000,-
4.	ACER Travelmate P214	4	Rp 18.330.000,-
5.	Microphone Wireless	2	Rp 4.055.000,-
6.	Audio Mixer	2	Rp 2.349.500,-
7.	Harddisk	1	Rp 1.891.000,-
8.	Kamera	2	Rp 19.600.000,-
Total Harga			**Rp 244.396.000,-**

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. surat penawaran
   d. daftar kuantitas dan harga;
   e. syarat-syarat umum Kontrak;
   f. syarat-syarat khusus Kontrak;
   g. spesifikasi khusus;
   h. spesifikasi umum dan
   i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
4. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
   a. **PPK** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2). Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

   b. **Penyedia** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      3). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      5). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      6). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      7). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaiamana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, **PPK** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Modal UIN Sumatera Utara Medan	Untuk dan atas nama Penyedia CV. IRA UTAMA KARYA
Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I NIP: 197503212003121002	**Agus Lubis** Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK
Nomor : 02/PPK-UIN SU/EP/FIS-PM/X/2024

Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Pekerjaan	:	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS
Anggaran	:	DIPA UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :
Nama : **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**
Alamat : Jl. Williem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara

Penyedia :
Nama : **CV. IRA UTAMA KARYA**
Alamat: : Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : **Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I**

Untuk Penyedia : **Agus Lubis**

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal:
22 Oktober 2024

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Jasa tersebut ditetapkan selama:
40 (empat puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 30 Nopember 2024

E. Harga Kontrak

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 244.396.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**

F. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan sesuai yang tercantum di dalam dokumen penawaran atau diminta oleh PPK.

G. Kepemilikan Dokumen

Penyedia **tidak** diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan pengadaan barang ini.

H. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan ini dibiayai dari DIPA UIN Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2024.
I.	
J. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini **tidak** diberikan uang muka.
K. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dalam bentuk pembayaran sekaligus sebesar Rp. 244.396.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 2. Mengajukan surat permohonan pembayaran pekerjaan dan pembayaran dilakukan ke rekening **Bank ACEH SYARIAH**, Cabang S Parman Medan, No. Rekening: **710.01.06.001133-5**,An. CV. IRA UTAMA KARYA.
L. Denda dan Ganti Rugi	1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan Kontrak secara sepihak adalah: **5% (lima persen)** dari Nilai Kontrak. **2.** Denda akibat Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu: **7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemutusan kontrak.** **(*Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh Penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan dan atau Penyedia menyetorkan ke Kas Negara*).** 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari **bagian Kontrak yang terlambat.** 4. Ganti rugi dibayarkan kepada Penyedia dengan cara: **Menghitung kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** 5. Ganti rugi dibayarkan kepada Penyedia dalam jangka waktu: **30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai dengan ketentuan tentang pencairan keuangan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan.**
M. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada: **Kas Negara.**
N. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini **tidak** diberikan Uang Muka.
O. Penyesuaian Harga	**Tidak berlaku.**
P. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: **Tidak ada**

Q. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan Sanksi: **Pemutusan Kontrak.**
R. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan **Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten** sebagai lembaga penyelesaian perselisihan.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK
Nomor : 02/PPK-UIN SU/EP/FIS-PM/X/2024

Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
Pekerjaan	:	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS
Anggaran	:	DIPA UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;

1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.9 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat *(unconditional)*, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 **Hari** adalah hari kalender;

1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.15 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** *adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan* yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal *penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.*

1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh penyedia.

1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK

1.23 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa lainnya tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakanatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif oleh PPK sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK (apabila ada).

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia (apabila ada); dan

d. Pengenaan daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi Lainnya.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Asal Barang**

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. **Korespondensi**

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. **Wakil sah para pihak**

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan jasa lainnya ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Sub penyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

16. Surat Perintah Mulai Kerja

16.1 PPK menerbitkan SPPBJ selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

16.2 SPMK harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPMK.

16.3 Tanggal penandatanganan SPMK oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

17. Program Mutu

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

a. informasi pengadaan barang;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

17.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
e. penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

19. Lingkup pekerjaan

Pengadaan jasa lainnya yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

20. Standar

Penyedia harus menyediakan jasa lainnya yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

21. Pemeriksaan Bersama

21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

22. Inspeksi Pabrikasi

22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

23. Pengepakan

23.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

23.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

24. Pengiriman

24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

25. Asuransi

25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight)* harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

26. Transportasi

26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

27. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

28. Pemeriksaan dan Pengujian

28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

29. Uji Coba

29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
30.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

30.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

30.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .

31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Incoterms

32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

34. Pedoman Pengoprasian dan Perawatan

34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

35. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Perubahan Kontrak

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

37. Perubahan Lingkup Pekerjaan

37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang

meliputi antara lain:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

37.2 Pekerjaan tambahan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

38. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

38.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e. Keadaan Kahar.

38.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

38.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

39. Pengertian

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:

a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk

menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian

B.5. Pemutusan dan Penghentian

43. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;

e. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah

melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. penyedia membayar denda; dan/atau
d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

44. Pemutusan oleh Penyedia

44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

45. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

46. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan

Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. berhak meminta dukungan dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
g. penyedia harus mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membuat antisipasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

48. Tanggung jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

50. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

51. Penanggungan

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:

a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

54.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

56. Jaminan

56.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

56.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

56.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;

56.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka (Jika Ada);

56.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan *pencapaian prestasi pekerjaan*;

56.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

56.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

58. Hak dan Kewajiban PPK

PPK mempunyai Hak dan kewajiban :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
d. memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

59. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

60. Pembayaran

60.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk:
   1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
   2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;

c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

g. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.2 Prestasi pekerjaan

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
   3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
   4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP).

e. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

60.3 Denda dan ganti rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Peristiwa Kompensasi

61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
f. Ketentuan lain dalam SSKK.

61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.

62. Harga Kontrak

62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;

62.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.

62.3 *[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].*

63. Penangguhan

63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak

pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

64. *Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)*

64.1 Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

64.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) bulan dan diberlakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani Para Pihak.

64.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.

64.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

64.5 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar* negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

64.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.

64.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

64.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

64.9 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan

penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

65. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Penyelesaian Perselisihan

Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Itikad Baik

67.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

67.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 PO BOX:2444
Telepon (061) 6615683-6622925 Faxsimile (061) 6615683
Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

SURAT PESANAN

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN FIS

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
	NOMOR : 01/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024 TANGGAL 22 OKTOBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Modal UIN Sumatera Utara Medan.
Alamat : Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **CV. IRA UTAMA KARYA**
Alamat : Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh : **AGUS LUBIS**
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Daftar Produk **ID PAKET : LTN-P2410-10712862**

No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan
1.	Headphone Wireless	2	Rp 7.899.500,-
2.	Personal Computer (PC)	2	Rp 21.020.000,-
3.	Laptop - ExpertBook	3	Rp 19.779.000,-
4.	ACER Travelmate P214	4	Rp 18.330.000,-
5.	Microphone Wireless	2	Rp 4.055.000,-
6.	Audio Mixer	2	Rp 2.349.500,-
7.	Harddisk	1	Rp 1.891.000,-
8.	Kamera	2	Rp 19.600.000,-
Total Harga			**Rp 244.396.000,-**

Terbilang:# Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah#

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. *Hak dan Kewajiban*
   a. Penyedia
      1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
      2) Penyedia memiliki kewajiban:
         a) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat

serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang terlampir dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2024;

d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

i. barang rusak akibat cacat produksi;

ii. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh *Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau*

iii. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana terlampir pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan berupa pengiriman barang sampai lokasi pesanan.

g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang terlampir pada SP ini.

b) *mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang* dipesan;

c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

i. Barang rusak akibat cacat produksi;

ii. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

iii. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan berupa pengiriman barang sampai lokasi sesuai pesanan.

e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia berupa pengiriman barang sampai lokasi sesuai pesanan.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan tambahan sesuai ketentuan dalam SP ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak penandatanganan SP ini yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kampus II UIN Sumatera Utara Medan, Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada 28 Oktober 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barangberdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

i. Barang rusak akibat cacat produksi;
ii. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
iii. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana terlampir pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan lisan dan/atau tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

6. Harga
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp 244.396.000,-** (Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
   b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.
   c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran pajak ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
   a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
   b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada tempat tujuan akhir; dan
      2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang dan/atau spesifikasi barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
    a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
    b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan

hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
    a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
    b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
    d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
    e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan/penggantian yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran
    a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan beserta dokumen kelengkapannya;
        2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus sebesar **Rp 244.396.000,-** (Dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ke Rekening **CV. IRA UTAMA KARYA** di Nomor Rekening **710.01.06.001133-5** pada **BANK ACEH SYARIAH Cabang S Parman Medan**
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada dan belum disetorkan ke kas negara) dan pajak.
    b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan telah diterbitkan.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
        1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
        2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
        3) menjual barang melalui dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
   1) Peringatan tertulis;
   2) Denda; dan
   3) Sanksi Daftar Hitam

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
   Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa beserta Turunannya.

14. Penghentian dan Pemutusan SP
   a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
   b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
      1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
         a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
         b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
         c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
         d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
         e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
         f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
      2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
   c. Pemutusan SP oleh Penyedia
      1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
         a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
         b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
         c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
      2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga satuan barang (termasuk PPN) sebagaimana tercantum dalam SP ini yang belum dikirim secara lengkap dan benar sesuai spesifikasi teknis terlampir untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar
    a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
    b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
    d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
    e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan
    Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interetasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi
    Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Pertanggungjawaban
    Penyedia bertanggung jawab atas semua tuntutan, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akibat kesalahan/kelalaian penyedia apabila terdapat pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah/institusi lain atau klaim dari pihak lain yang bersangkutan.

20. Masa Berlaku SP
    SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan kecuali pertanggungjawaban penyedia sebagaimana tercantum dalam angka 19 pada SP ini.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Belanja Mod UIN Sumatera Utara Medan	Untuk dan atas nama Penyedia CV. IRA UTAMA KARYA
Muhammad Akhir Nasution, S.Pd.I NIP. 197503212003121002	**Agus Lubis** Direktur

ecatalogue
e-katalog.lkpp.go.id

Informasi Paket

Etalase Produk	:	**Peralatan Elektronik dan Pendukungnya**
ID Paket		**LTN-P2410-10712862**
Jenis Paket	:	**Purchasing**
Nama Paket	:	**Pengadaan Peralatan Dan Mesin FIS**
Instansi	:	**Kementerian Agama**
Satuan Kerja	:	**UIN SUMATERA UTARA MEDAN**
Alamat Satuan Kerja	:	**JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara**
NPWP	:	**00.158.900.1-125000**
Sumber Dana	:	**APBN (DK.2132.BEI.003.004.0C.532111)**

Tanggal Buat	:	**21 Oktober 2024**
Tanggal Ubah	:	**22 Oktober 2024**
Jumlah Produk	:	**8**
Harga Total	:	**Rp 244.396.000,00**
		Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah
Kurs	:	**IDR**
Nilai Kurs	:	**1.00**
Tanggal Kurs	:	**21-10-2024**
Tahun Anggaran		**2024**

PP/Pemesan

Muhammad Akhir N.
081361176555
nasutionemakhir@gmail.com

PPK

Muhammad Akhir N.
081361176555
nasutionemakhir@gmail.com

Penyedia

CV. Ira Utama Karya
Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur
cirautamakarya@yahoo.com
-

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

CV. Ira Utama Karya
Jl. KH. Agus Salim LK. VIII Kel./Desa Teladan Kec. Kota Kisaran Timur
cirautamakarya@yahoo.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Headphone Wireless
Manufaktur	
Kuantitas	2
Harga Satuan	Rp 7.899.500,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 15.799.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan

Nama Produk	Personal Computer (PC)
Manufaktur	
Kuantitas	2
Harga Satuan	Rp 21.020.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 42.040.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

Nama Produk	Laptop - ExpertBook
Manufaktur	
Kuantitas	3
Harga Satuan	Rp 19.779.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 59.337.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

Nama Produk	ACER Travelmate P214
Manufaktur	ACER
Kuantitas	4
Harga Satuan	Rp 18.330.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 73.320.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

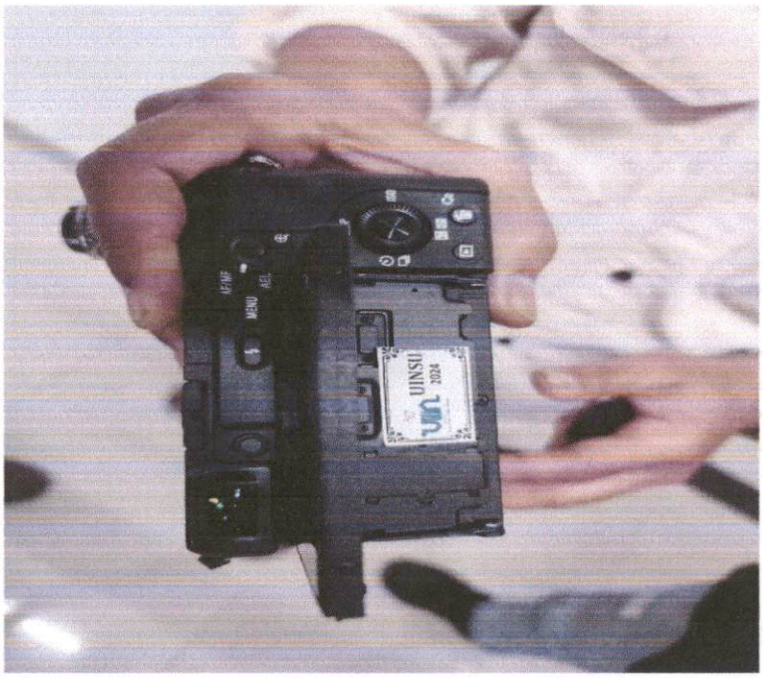
Nama Produk	Microphone Wireless
Manufaktur	
Kuantitas	2
Harga Satuan	Rp 4.055.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 8.110.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

Nama Produk	Audio Mixer
Manufaktur	
Kuantitas	2
Harga Satuan	Rp 2.349.500,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 4.699.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

Nama Produk	Harddisk
Manufaktur	
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 1.891.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 1.891.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

Nama Produk	Kamera
Manufaktur	
Kuantitas	2
Harga Satuan	Rp 19.600.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	28-10-2024 (28 Oktober 2024)
Total Harga	Rp 39.200.000,00
Catatan	Free Ongkos Kirim ke lokasi pemesanan, sertakan Sticker UINSU MEDAN 2024 dengan Logo pada produk.

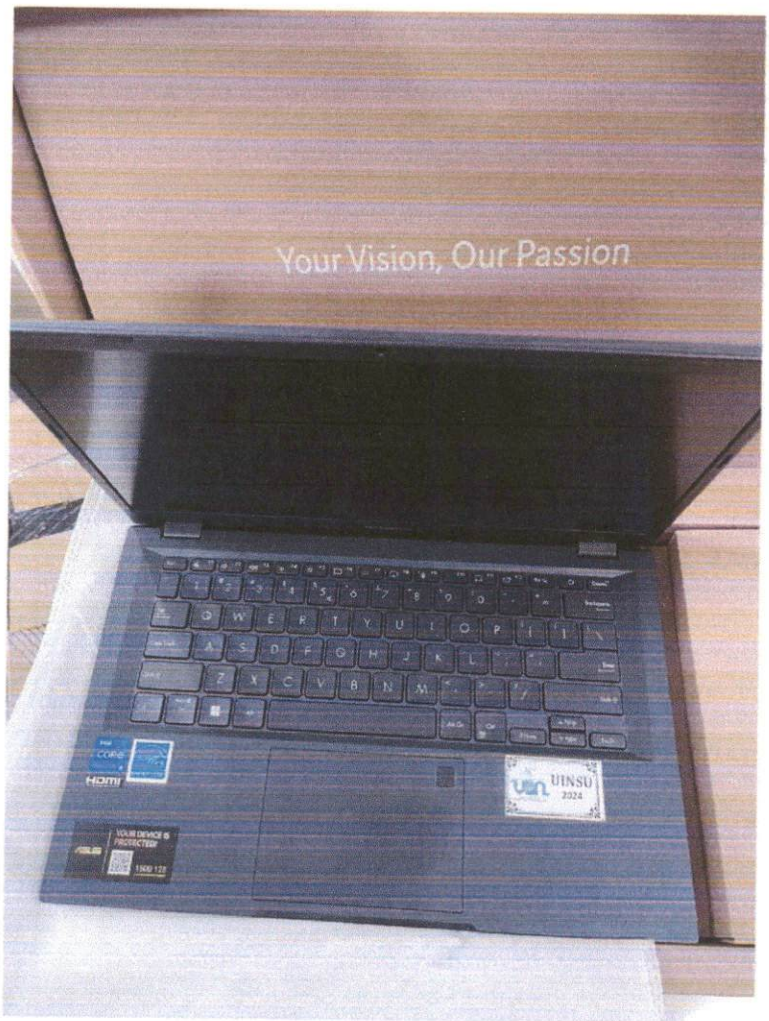
Ini merupakan informasi paket, bukan surat

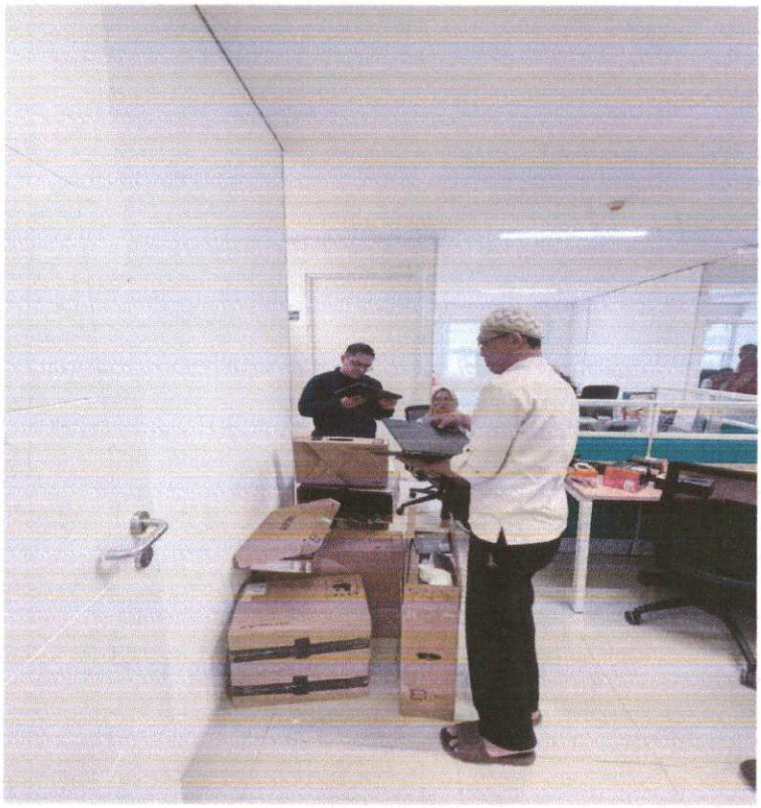

AF-MF
MENU
AEL
UINSU
2024

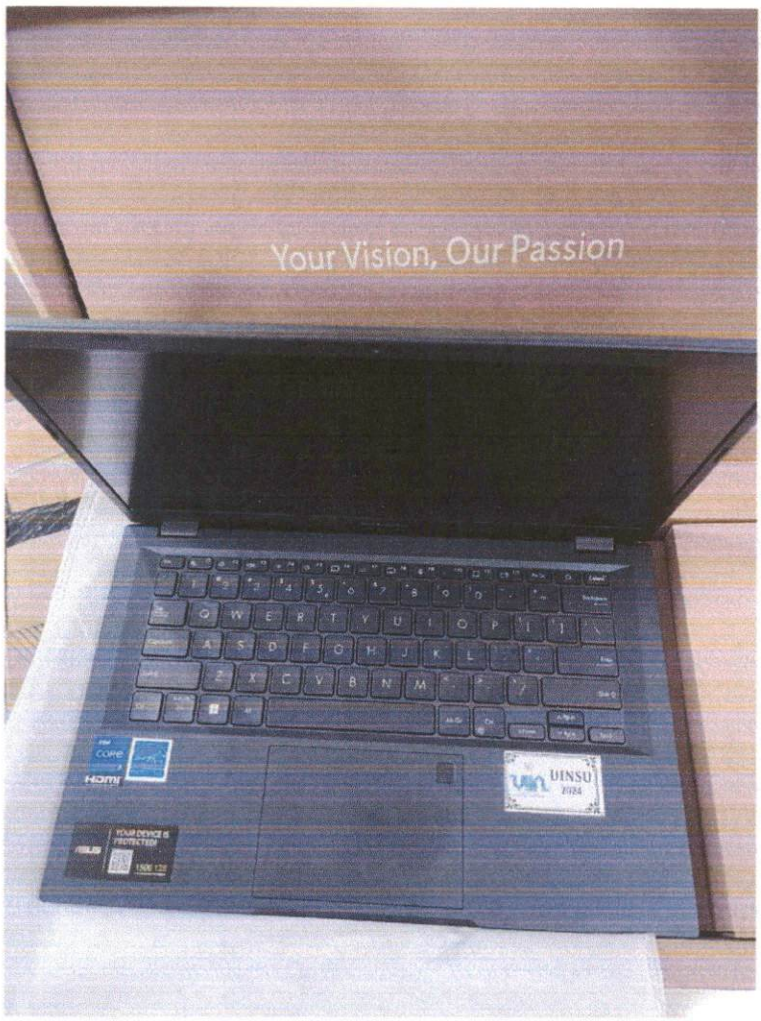



ASUS ExpertBook
ASHLEY
PRO-1
PROFESSIONAL




Your Vision, Our Passion
UINSU
2024




Your Vision, Our Passion
UINSU
2024

[Kode : KOM001]

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMEN DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024

Tanggal : 22-Oktober-2024

No	No. Line Detail COA Termin Pembayaran Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	Nilai
Line 1 **424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000**		**244.396.000,00**
Pembayaran ke 1		
1	003.004.0C.006043-Hard Disk	1.891.000,00
2	003.004.0C.006044-Audio Mixer Saramonic	4.699.000,00
3	003.004.0C.006045-Kamera Sony	39.200.000,00
4	003.004.0C.006046-Headphone Wireless	15.799.000,00
5	003.004.0C.006047-Laptop Expertbook	59.337.000,00
6	003.004.0C.006048-Laptop	73.320.000,00
7	003.004.0C.006049-Microphone Wireless	8.110.000,00
8	003.004.0C.006050-PC	42.040.000,00
	Jumlah	**244.396.000,00**
Jumlah		**244.396.000,00**

MEDAN, 24-Oktober-2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUMATERA UTARA MEDAN

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I

NIP 197503212003121002

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	424007
	UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Per Tanggal : 06-Nov-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	:	**1193750**
SPAN Nama Supplier	:	CV. IRA UTAMA KARYA_0015793987115000
Nama Supplier	:	CV. IRA UTAMA KARYA
NPWP	:	0015793987115000
Nama Site	:	**2_21212**

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	CV. IRA UTAMA KARYA
Nama Bank	:	BPD ACEH SYARIAH
No rekening	:	71001060011335
Nama Pemilik Rekening	:	CV IRA UTAMA KARYA
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Tahunan	:	**A/123.24001125/0/0**
Nilai Kontrak Tahunan	:	244,396,000.00
Satker	:	424007 UIN SUMATERA UTARA MEDAN
No. Kontrak	:	No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024
No. RFC	:	424007|2024|No. 02/PPK-UINSU/EP/FIS-PM/X/2024|0|2306157
Tanggal Kontrak	:	22-Oct-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	22-Oct-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	40
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-025.04.2.424007/2024;11-Nov-2023; ;
No. Addendum	:	
Ketentuan Sanksi	:	Denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai pekerjaan setiap hari keterlambatan
Keterangan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Tahun 2024 Dengan Rincian Headphone Wireless 2 Unit, PC 2 Unit, Laptop 7 Unit, Microphone Wireless 2 Unit, Audio Mixer 2 Unit, Harddisk 1 Unit dan Kamera 2 Unit.

Tanggal Selesai Kontrak	:	30-Nov-2024
Tanggal Addendum	:	
Kategori PHLN	:	
Mata Uang	:	Rupiah
Tipe Kurs	:	-
Nilai Kurs	:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Tahun 2024	RM	244,396,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Tahun 2024	02 Desember 2024	244,396,000.00	00420T	00420A	Kontraktual	0.00	0.00	424007.123.532111.02504DK.2132BEI.A000000001.00000.2.0751.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	244,396,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	244,396,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AKHIR NASUTION, S.PD.I

NIP 197503212003121002

Bank Aceh iB
Kepercayaan dan Kemitraan

No. : B. 079683

REFERENSI BANK iB BANK ACEH SYARIAH
Nomor: 084/710.MDN/02/XII/2022

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu S. Parman Medan, berkedudukan di Jalan S. Parman No.3–3A Kec. Medan Baru, Medan Telp. (061) 88814846, 88814847 Fax. (061) 88814848, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: **CV.IRA UTAMA KARYA**
Nomor Rekening	: **710.01.06.001133-5**
Direktur	: **NOVI MARLIZA**
Alamat Perusahaan	:**JL KH AGUS SALIM LK VIII KEL DESA TELADAN KISARAN**

   Adalah Pemegang Rekening Giro Wadiah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu S. Parman Medan sejak tanggal **24 NOVEMBER 2021**

2. Surat Keterangan (Referensi) ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk Keperluan Pekerjaan :

   UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI.

3. Pemberian Keterangan (Referensi) ini tidak mengikat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu S.Parman Medan dan batal dengan sendirinya jika dipergunakan menyimpang dari maksud tersebut di atas.

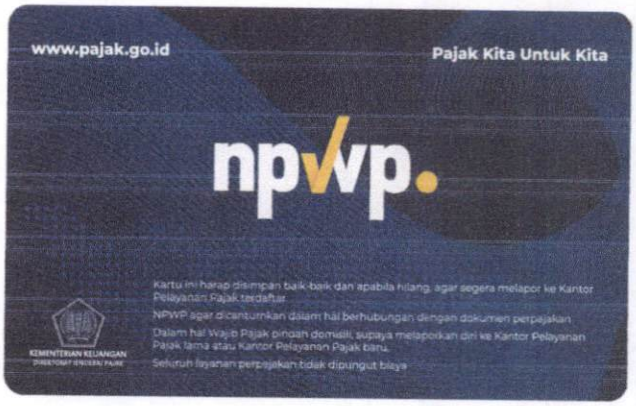
Medan, 02 Desember 2022
PT. Bank Aceh Syariah
KCP S. Parman Medan

HARIYADI SETIAWAN
Pemimpin

KANTOR CABANG S. PARMAN MEDAN
JL. S. PARMAN NO. 3-3A KOTA MEDAN BARU

Perusahaan	:	CV. IRA UTAMA KARYA
NPWP	:	0 15 793 987 115 000
No Rekening	:	710.01.06.001133-5
Alamat	:	Jalan KH. Agus Salim Lk. VII, Kel. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab Asahan, Provinsi Sumatera Utara


npwp.
KPP PRATAMA KISARAN
01.579.398.7-115.000
IRA UTAMA KARYA
NPWP16 : 0015 7939 8711 5000
JL KH AGUS SALIM LK VIII, TELADAN, KOTA KISARAN TIMUR, KAB. ASAHAN, SUMATERA UTARA, 21222
Tanggal Terdaftar 21/03/1999
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.001-24.15472886

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV IRA UTAMA KARYA
Alamat : JL KH AGUS SALIM LK VIII , KAB. ASAHAN
NPWP : 015793987115000 / 0015793987115000
NITKU : 001579398711500000000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Alamat : Williem Iskandar Psr V Medan Estate Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.Kenangan Baru Kec.Percut Sei Tuan Kota/Kab.Deli Serdang Sumatera Utara 20371
NPWP : 001589001125000 / 0001589001125000
NITKU : 000158900112500000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin FIS Rp 244.396.000 x 1	244.396.000,00
Harga Jual / Penggantian		244.396.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		220.176.577,00
Total PPN		24.219.423,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. ASAHAN, 27 Oktober 2024

AGUS LUBIS

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP